

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit ✓ Halaman : 15

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Raih WTP Enam Kali Berturut-Turut

**KUALA KURUN** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

"Raihan opini WTP ini merupakan yang ke tujuh bagi Pemkab Gumas. Dimana, enam kali diperoleh secara berturut-turut, yakni tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Sebelumnya Pemkab Gumas juga meraih opini WTP pada tahun anggaran 2012," ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, Jumat (13/5).

Atas capaian ini dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan tersebut, sehingga mampu mempertahankan opini WTP untuk yang keenam kali secara berturut-turut.

"Tentu keberhasilan ini tidak didapat dengan mudah. Butuh kolaborasi dan kerjasama dari seluruh pihak secara maksimal, sehingga mampu meraih prestasi yang terbaik," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gumas Hardeman mengatakan, opini WTP yang didapatkan Pemkab merupakan hasil pemeriksaan tahunan BPK RI Kalteng, atas

laporan keuangan tahun anggaran 2021.

"Dalam hal ini penilaian keuangan daerah Kabupaten Gumas memperoleh nilai tertinggi pada tahun anggaran 2021, sehingga kembali berhasil mempertahankan opini WTP," ujarnya.

Kedepan lanjut dia, diharapkan Pemkab Gumas mampu mempertahankan prestasi tersebut ditahun-tahun berikutnya. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, perlu kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu peran serta dan kerja keras dari seluruh OPD, agar nantinya opini WTP bisa kembali diraih," tandas Hardeman. (arm/gus)